

Potensi Wisata Syariah Candi Muara Jambi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Fiza Fradesa¹, Pit Arzuna², Maryanti Sawitry³

¹UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

fizafradesa97@gmail.com

²STAI Ma'arif Jambi

pitarrizky13@gmail.com

³IAI Nusantara Batanghari

maryantisawitry.ms@gmail.com

Abstract

This scientific article aims to discuss The Potential of Sharia Tourism Muara Jambi Temple on Regional Economic Growth. The data collection techniques in this study used qualitative methods through observation, interviews, documentation, and triangulation techniques, as well as data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results of his research are that Muara Jambi Temple has the potential to become sharia tourism, seen from its development which can have a significant impact on the economy, about 45% of the people around the temple area who depend their lives on this tourist spot. However, when viewed as a whole, this tourist spot has no potential as a sharia tourist place because in its management there are still several policies that do not lead to sharia rules, so improvements and improvements still need to be reviewed so that later this place can be used as sharia tourism, it is predicted around 10-15 years later this temple can be realized as a sharia tourism. The government and related stakeholders are expected to further strengthen the synergy to build Jambi tourism for the better in order to increase regional economic growth.

Keywords: *Potential, Sharia Tourism, Economic Growth.*

Abstrak

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk membahas Potensi Wisata Syariah Candi Muara Jambi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi, serta teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitiannya yaitu Candi Muara Jambi berpotensi menjadi wisata syariah dilihat dari perkembangannya yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan di bidang ekonomi, sekitar 45% masyarakat sekitar kawasan Candi yang menggantungkan hidupnya di tempat wisata ini. Namun jika dilihat secara keseluruhan, tempat wisata ini belum berpotensi sebagai tempat wisata syariah sebab dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa kebijakan yang belum mengarah pada aturan syariah, sehingga perbaikan dan peningkatan masih perlu ditinjau kembali agar nantinya tempat ini bisa dijadikan sebagai wisata syariah, diprediksikan sekitar 10-15 tahun lagi baru Candi ini dapat terealisasi menjadi wisata syariah. Pemerintah beserta stakeholder terkait diharapkan lebih menguatkan sinergitas guna membangun pariwisata Jambi menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata Kunci: Potensi, Wisata Syariah, Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Dewasa ini perbankan dan keuangan syariah dunia mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga turut mempengaruhi sektor bisnis yang lainnya, tak terkecuali bisnis pariwisata. Wisata syariah saat ini menjadi trend baru dalam pariwisata dunia, perkembangannya terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal itu dapat dilihat pada tahun 2015 Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pernah memenangkan dua penghargaan sekaligus dalam ajang pariwisata internasional yaitu *World's Halal Travel Awards* (WHTA) yang digelar oleh Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) dan diikuti 200 negara di dunia. Pulau Lombok menang dalam kategori *World Best Halal Tourism Destination* dan *World Best Halal Honeymoon Destination*, bersaing dengan Abu Dhabi, Mesir, UEA, Malaysia dan Turki. Adapun dampak dari penghargaan itu, yakni jumlah kunjungan wisatawan (baik lokal maupun mancanegara) meningkat hingga 50% dari tahun sebelumnya.

Menteri Pariwisata, Arief Yahya pada tahun 2019 menargetkan Indonesia dapat menyalip Malaysia untuk menempati posisi pertama sebagai destinasi pariwisata paling ramah terhadap wisatawan muslim dunia versi Global Muslim Travel Index (GMTI). Selanjutnya, Kemenpar juga menargetkan tahun depan Indonesia bisa menggaet 5 juta wisatawan *halal tourism*. Angka itu tumbuh 42 persen dari tahun ini sekitar 3,5 juta atau mencapai 25 persen dari target 20 juta kunjungan wisman (Republika/12/2018), Indonesia diakui memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pariwisata halal di skala global karena didukung dengan keindahan alam, keragaman budaya dan populasi muslim terbesar di dunia.

Pada tahun 2022, data yang diperoleh dari Global Muslim Travel Index (GMTI), Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua sebagai destinasi wisata halal atau ramah muslim terbaik dari 138 negara di dunia. Prestasi ini tentu sangat membanggakan di tengah kemajemukan suku dan bangsa di Indonesia (Kompas/06/2022). Namun, bukan pula menjadi hal yang mustahil jika nantinya Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim

dapat menjadi pusat destinasi wisata syariah di dunia. Tentunya hal ini harus kita sambut baik dengan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki agar pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah dapat meningkat sehingga masyarakat Indonesia menjadi Negara yang makmur dan sejahtera.

Usaha demi usaha terus diupayakan oleh Kemenpar dalam mempromosikan Indonesia sebagai pusat destinasi pariwisata halal yang layak untuk diapresiasi. Namun, penting untuk dipikirkan bahwa pengembangan pariwisata halal tidak melulu hanya melakukan promosi secara masif saja guna mengejar posisi tertentu di skala global, tapi juga harus didukung dengan regulasi yang kuat sebagai landasan dalam melangkah. Di Indonesia, regulasi pariwisata halal masih tergolong lemah karena tidak ada aturan yang mengaturnya secara spesifik baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Menteri. Hingga saat ini aktivitas wisata halal hanya mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Definisi pariwisata menurut UU tersebut, pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 1 butir 3). Sayangnya, UU ini hanya mengatur kepariwisataan secara umum, dan belum mengatur pariwisata halal. Meskipun kata pariwisata halal tidak disebutkan secara gamblang dalam definisi yang tertuang dalam UU tersebut, namun bila diamati secara seksama kata "berbagai macam kegiatan wisata" dalam definisi pariwisata dapat mengindikasikan dibolehkannya melakukan kegiatan pariwisata berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah.

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pengembangan wisata syariah dengan cara memaksimalkan sertifikasi halal kepada seluruh produk baik makanan, minuman, maupun *souvenir* yang diperjualbelikan di kawasan wisata syariah. Koordinasi dan sinergi antar Kementrian dan Lembaga terkait guna menyusun pedoman dan regulasi supaya ekosistem wisata syariah dapat terjaga dan terus meningkat. Serta sosialisasi dan sinkronisasi akan terus digalakkan ke Pemerintah Daerah untuk pengembangan

kawasan wisata syariah di masing-masing daerah.

Mariotti dan Yoeti menyebutkan potensi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata dan memiliki daya tarik tersendiri sehingga orang-orang tertarik untuk berkunjung ke lokasi tersebut (Haryati & Wuka, 2021). Persepsi kebanyakan orang selama ini wisata syariah selalu dianggap sebagai suatu wisata yang ditujukan ke kuburan (ziarah) atau pun ke masjid. Padahal, wisata syariah tak diartikan seperti itu, Tohir Bawazir dalam (Mahardika, 2020) mendefinisikan wisata syariah sebagai wisata yang prosesnya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, dimulai dari niatnya yang semata-mata hanya untuk ibadah dan mengagumi ciptaan Allah. Selama dalam perjalannya para wisatawan tidak meninggalkan ibadah dan setelah sampai tujuan wisata tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan dan minum yang halal dan thayyiban, sehingga kepulangannya pun dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah SWT.

Hal ini pernah ditegaskan oleh Ma'ruf Amin, Ketua MUI bahwasanya bagi turis muslim, wisata syariah sebagai bagian dari dakwah. Namun bagi turis yang non-muslim, wisata syariah dengan produk halal ini menjadi jaminan sehat sertifikasi halal MUI yang sudah melewati Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jadi pasti dijamin sehat dan bersih. Yang turis muslim tak perlu khawatir akan kehalalannya, dan turis non-muslim yakin kalau makanan ini terjamin kebersihannya.

Konsep wisata syariah diartikan sebagai suatu proses penggabungan dari nilai-nilai ke-Islaman ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata (Lara Jingga Melania et al., 2019). Sejak tahun 2000 konsep ini telah dibahas dan diperkenalkan saat pertemuan dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Wisata syariah merupakan kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, serta pemerintah yang memenuhi standar syariat Islam. Nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama pada konsep ini, artinya bahwa seluruh aspek kegiatan wisata tentu tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata.

Adapun yang menjadi kriteria obyek wisata syariah menurut Hery dan Fitria dalam (Azhar & Salman, 2020) yakni sebagai berikut: a) Obyek wisatanya terdiri dari wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya. b) Fasilitas ibadah yang tersedia harus layak dan suci. c) Makanan dan minuman dijamin halal. d) Atraksi maupun pertunjukan seni dan budaya tidak boleh bertentangan dengan kriteria umum dari wisata syariah. e) Kebersihan lingkungannya terjaga.

Menurut Chookaew dalam (Nasution et al., 2020), ada delapan indikator standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolannya, yaitu sebagai berikut: 1) Secara keseluruhan pelayanan harus sesuai dengan prinsip Islam; 2) Pemandu dan staf harus mempunyai disiplin serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam; 3) Mengatur semua kegiatan supaya tak bertentangan dengan prinsip Islam; 4) Bangunan harus disesuaikan dengan prinsip Islam; 5) Restoran harus mengikuti standar internasional layanan yang halal; 6) Layanan transportasi harus mempunyai sistem proteksi keamanan; 7) Menyediakan tempat-tempat untuk semua wisatawan muslim dalam melakukan kegiatan keagamaan; 8) Terakhir, para wisatawan tidak bepergian ke tempat-tempat yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Aan Jaelani dalam penelitiannya yang berjudul *Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospect* dengan hasil penelitian bahwa Indonesia dengan mayoritas Muslim memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan wisata halal dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi kiblat dunia (Jaelani, 2017). Ada juga penelitian dari (Rachmiatie et al., 2020), destinasi halal di Indonesia memiliki potensi pasar yang besar. Di dalam negeri sendiri terdapat 250 juta umat Muslim, yang memerlukan terpenuhinya empat kebutuhan wisatawan Muslim. Apabila diproyeksikan pada tahun 2019 terjadi 242 juta perjalanan, peluang ini pun menjadi semakin besar.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu dalam konferensi yang bertajuk "The 1st OIC International Forum on Islamic Tourism (OIFIT) 2014" pernah menyatakan bahwa ada sembilan destinasi wisata syariah yang ada di Indonesia, yaitu

Riau, Sumatera Barat, Banten, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, dan Lombok. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), budaya masyarakat di tempat wisata, maupun fasilitas yang tersedia seperti restoran, hotel, objek wisata dan daya tarik wisata lainnya yang menjadi tolak ukur penilaiannya. Sayangnya Provinsi Jambi belum termasuk dari sembilan destinasi wisata syariah yang disebutkan diatas, namun tidak menutup kemungkinan jika nantinya Provinsi Jambi menjadi salah satu kota wisata syariah juga. Karena Jambi memiliki potensi untuk mempersiapkan dan mengembangkannya. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwasanya Provinsi Jambi memiliki sebanyak 255 daya tarik wisata yang penyebarannya terdapat di 11 Kabupaten/Kota, dimana 91 diantaranya merupakan wisata alam. Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah yang dinilai memiliki potensi tinggi dalam bidang daya tarik wisatanya. Hal ini terlihat dari data distribusi wisatawan yang menunjukkan angka jumlah kunjungan yang mengalami kenaikan di tiap tahunnya.

Candi Muara Jambi merupakan salah satu objek wisata di Provinsi Jambi (tepatnya berada di Kabupaten Muaro Jambi) yang patut untuk didorong dan dikembangkan lebih lanjut. Mengutip laman Pemerintah Provinsi Jambi, kompleks Candi Muaro Jambi merupakan situs peninggalan purbakala terluas di Asia Tenggara. Candi ini membentang dari barat ke timur tepian Sungai Batanghari yang panjangnya mencapai 7,5 kilometer. Bahkan, luas keseluruhan kompleks Candi ini sekitar 12-kilometer persegi, tentu saja 8 kali lebih luas daripada Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Candi Muara Jambi penting untuk didorong dan dikembangkan karena memiliki pengaruh yang positif. Tak hanya memberikan manfaat secara ekonomis saja, lebih dari itu Candi ini mampu membangun nilai-nilai budaya, mempertahankan kearifan lokal, melestarikan peninggalan purbakala yang ada, serta mampu untuk memperkenalkan wisata Jambi ke masyarakat secara luas bahkan sampai ke mancanegara sekalipun.

Akan tetapi tampaknya peluang ini kurang bisa dimanfaatkan dengan baik

oleh para *stakeholder* terkait. Mulai dari sisi fasilitas, pelayanan maupun promosi yang masih belum maksimal, penerapan kebijakan yang kurang tepat sasaran, serta Sumber Daya Manusia (SDM) setempat yang minim terkait pariwisata syariah. Pada dasarnya Candi ini merupakan Program Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang pengembangannya tidak lepas dari peran Pemerintah dan masyarakat, mulai dari proses perencanaannya, pengorganisasiannya, pelaksanaannya maupun pengawasannya. Berikut data jumlah pengunjung Candi Muara Jambi akan disajikan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Candi Muara Jambi Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Pengunjung (orang)
2017	108.677
2018	123.276
2019	110.768
2020	98.855
2021	109.394

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2021 (diolah)

Jumlah pengunjung Candi Muara Jambi pada tahun 2017 sampai 2021 mengalami fluktuasi, namun cenderung menurun. Jumlah pengunjung pada tahun 2018 sebanyak 123.276 orang. Kondisi ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Disinyalir penurunan disebabkan karena banyaknya objek wisata baru yang bermunculan di Jambi, seperti Jambi Paradise, Pulau Berhala, Geopark Merangin, dan lain sebagainya. Selain itu pada tahun 2020 sebanyak 98.855 orang, turun dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda sehingga Pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tetap di rumah.

Adapun pengunjung yang datang ke Candi ini berasal dari wisatawan lokal (masyarakat umum, pelajar/mahasiswa, dan instansi) sedangkan untuk wisatawan asing yakni pengunjung yang berasal dari berbagai Negara di belahan dunia. Wisatawan yang datang pun memiliki berbagai macam tujuan, yakni ada yang bertujuan untuk rekreasi semata dan ada juga yang berwisata karena kepentingan penelitian, menulis, beribadah,

dan lain sebagainya. Ditinjau dari aspek wisata syariah, candi ini memiliki sarana tempat ibadah bagi wisatawan muslim seperti mushola, adanya seloko adat, acara qasidahan, serta kompiangan di setiap penampilan kesenian ataupun setiap event yang diselenggarakan.

Prof. Simon Kuznets dalam penelitian (Rahmi, 2020) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang serta kemampuan suatu negara dalam menyediakan barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Tentunya kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya. Pengertian ini memiliki 3 (tiga) komponen, diantaranya: 1) pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat terlihat dari meningkatnya persediaan barang secara terus-menerus; 2) kemajuan teknologi menjadi faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan beragam barang kepada masyarakat; 3) penggunaan dan pemanfaatan teknologi secara efisien dan luas tentunya memerlukan penyesuaian pada bidang kelembagaan maupun ideologi, sehingga inovasi yang nantinya dihasilkan oleh ilmu pengetahuan manusia dapat dimanfaatkan secara tepat guna. Sementara menurut Solow-Swan dalam (Ramadhany & Ridlwan, 2018) pertumbuhan ekonomi bergantung pada jumlah penyediaan faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, penduduk, modal serta tingkat kemajuan teknologinya.

Tujuan dari pertumbuhan ekonomi ini sendiri yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan Negara atau daerah tempat wisata tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi wisata syariah yang ada di daerah itu, mengingat banyak sekali keuntungan atau manfaat yang bisa diambil dari kegiatan pariwisata, antara lain dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat, memperkenalkan seni budaya daerah serta memasarkan hasil kerajinan daerah kepada wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.

Hasil riset yang dilakukan oleh (Nasution et al., 2020), pengembangan wisata halal di

Kota Mataram menjadi penyumbang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Mataram. Pengembangan pariwisata telah membuka peluang kerja yang lebih besar sehingga mengurangi pengangguran. Dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat, maka akan berdampak pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk dapat hidup sehat dan kemudahan mengakses sarana prasarana kesehatan serta kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Selain itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di daerah ini juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Merujuk pada deskripsi di atas, maka penelitian ini fokus pada Potensi Wisata Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena dengan melihat objeknya berupa kondisi saat ini yang sedang berlangsung (Ezizwita et al., 2022). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Adapun desain yang digunakan dalam penelitian memiliki sifat diantaranya; *emergent, evolving, dan developing*. Sebab penjelasan yang dilakukan berupa gambaran umum yang sifatnya sementara, artinya apa yang diteliti sifatnya fleksibel dan kemungkinan masih dapat terjadi perubahan.

Terdapat dua jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utamanya. Dalam penelitian ini data primer didapat dari observasi, yakni dengan melakukan wawancara dengan responden terkait. Adapun peneliti melakukan wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Pihak Tata Kelola Candi, Pihak Akademisi, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi Jambi, maupun masyarakat sekitar Candi. Sementara data sekunder merupakan

data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari literatur-literatur, buku-buku, jurnal, maupun data lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Sementara untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (teori Miles dan Huberman dalam Sugiyono) (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Candi Muara Jambi mendapat julukan sebagai Candi terluas di Asia Tenggara, hal itu terlihat dari luas kewasannya yang mencapai 3.981 Ha. Berkenaan juga dengan letaknya yang berada di aliran sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera, berhulu di Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara di Pantai Timur Jambi. Lokasi Candi ini berada di Kecamatan Muaro Sebo, di wilayah Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selain itu, candi ini tersebar di 2 kecamatan dan 8 desa. Area yang berada di Kecamatan Maro sebo yaitu Desa Danau Iamo, Muaro Jambi, dan Desa Baru. Sementara untuk area yang terletak di Kecamatan Taman Rajo meliputi Desa Tebat Patah, Kemingking Dalam, Dusun Mudo, Teluk Jambu, dan Desa Kemingking Luar. Untuk sampai ke Candi ini, wisatawan dapat menempuhnya menggunakan perjalanan darat maupun sungai. Apabila wisatawan menggunakan transportasi darat, jarak antara Kota Jambi dengan situs ini kurang lebih 30 km. Sementara jika menggunakan jalur sungai dapat ditempuh dengan waktu lebih kurang 1 jam perjalanan.

Candi Muara Jambi merupakan peninggalan dari Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya yang dijadikan sebagai pusat peribadatan agama Buddha terluas di Indonesia pada abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-4 sampai ke-5 Masehi oleh Kerajaan Melayu yang kemudian ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Sejarah mencatat bahwa Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya diakui sebagai kerajaan yang berpengaruh sangat luas, tak hanya di Nusantara tapi juga di daratan

Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand. Menurut data dari BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Provinsi Jambi yang berada dibawah naungan Kemendikbud, terdapat total 126 Situs candi di Kompleks Percandian Muara Jambi dengan kondisi 8 candi yang telah selesai di pugar dan sisanya masih terkubur di dalam tanah ataupun belum seluruhnya direstorasi. Terdapat 8 candi yang sudah direstorasi dan digunakan dalam kegiatan pariwisata religi di Candi Muara Jambi.

Pada tahun 2009, Komplek Candi Muara Jambi telah didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi ke UNESCO sebagai salah satu warisan dunia di Indonesia. Selain itu pada tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah meresmikan Candi ini sebagai Kawasan Wisata Sejarah Terpadu yang terdapat di Sumatera dengan alasan kawasan cagar budaya Muara Jambi mempunyai potensi untuk dinominasikan sebagai warisan budaya dunia. Potensi ini tergambar dari keluasan kawasan, keragaman cagar budaya, maupun sejarah kebudayannya. Saat ini Candi Muara Jambi dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi, meskipun dalam status wilayah konservasi, kawasan percandian dianggap rentan terhadap perubahan lingkungan dikarenakan area yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara (Booklet Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi, BPCB Jambi 2016).

Hubungan Antara Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Seiring berkembangnya pariwisata di suatu daerah, maka akan sangat memungkinkan jika perekonomian di daerah itu juga ikut berkembang. Hal ini terjadi karena ekonomi dan pariwisata memiliki hubungan yang kuat. Keduanya dapat saling melengkapi satu sama lain. Ekonomi akan tumbuh subur jika didorong oleh pariwisata yang maju, lebih-lebih bagi para pelaku usaha sekitar wisata (baik pelaku usaha kecil, menengah, ataupun besar). Antara pariwisata dan pertumbuhan ekonomi, keduanya telah terhubung oleh beragam cara agar dapat memberikan sumbangsih maupun kontribusi terhadap pengembangan ekonomi daerah wisata.

Tak dapat dielakkan lagi jika pariwisata menjadi salah satu sektor yang mampu meningkatkan pendapatan (*income*) terhadap suatu daerah (Rozi et al., 2021). Utamanya bagi daerah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang mumpuni di bidang pariwisata. Keoptimalisasian pariwisata akan tercipta jika Pemerintah dan masyarakatnya saling bersinergi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat jika sarana maupun prasarana memadai sehingga muncullah antusiasme dari para wisatawan untuk berkunjung di tempat wisata tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diartikan sebagai salah satu modal dasar Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah adalah dari sektor pariwisata (Pebriana et al., 2021). Model ekonomi pariwisata menurut Cooper terdiri dari tiga unsur yang saling terkait, yaitu: 1) konsumen dalam hal ini adalah wisatawan; 2) adanya barang maupun jasa dari sektor ekonomi; 3) adanya mata uang yang beredar dalam bertransaksi (Subarkah, 2018).

Hubungan antara pariwisata dan pertumbuhan ekonomi dari sisi ekonomi makro dari pariwisata, yakni: (1) secara langsung pariwisata memiliki dampak terhadap perekonomian, antara lain terhadap penciptaan lapangan kerja, redistribusi pendapatan, dan penguatan neraca pembayaran. Belanja turis, sebagai bentuk alternatif dari ekspor memberikan kontribusi berupa penerimaan devisa (neraca pembayaran) dan pendapatan yang diperoleh dari ekspansi pariwisata. Penerimaan devisa dari pariwisata juga bisa digunakan untuk mengimpor barang-barang modal untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, yang pada gilirannya menyebabkan pertumbuhan ekonomi; (2) efek stimulasi terhadap pasar produk tertentu, sektor pemerintah, pajak dan juga efek imitasi terhadap komunitas. Salah satu manfaat utama bagi komunitas lokal yang diharapkan

dari pariwisata adalah kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian daerah, terutama peningkatan pendapatan dan pekerjaan baru di daerah (Aponno, 2020).

Secara garis besar pariwisata mempunyai peran penting dalam meningkatkan sektor ekonomi, diantaranya: pekerjaan dapat tercipta, pendapatan menjadi beragam, usaha lokal akan tumbuh, ini yang menjadikan pariwisata sangat berdampak terhadap ekonomi suatu daerah. Jadi, ekonomi dan pariwisata memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Pariwisata bisa dijadikan sebagai penggerak ekonomi daerah wisata yang tahan akan krisis ekonomi, mudah untuk dikembangkan, serta ekonomi menjadi unsur dalam membantu perkembangan wisata, terutama wisata syariah yang diharapkan mampu menjadi tonggak ekonomi dengan cara meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan investasi ke Kabupaten Muaro Jambi.

Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Telah lama disadari oleh Negara maju maupun Negara berkembang bahwasanya sektor pariwisata mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Dapat dilihat dari banyaknya sponsor dalam pengembangan obyek wisata maupun dari berbagai upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam proses pemasarannya. Sangat diyakini bahwa pariwisata mampu menjadi sebuah "*agent*" yang "*powerful*" dalam rangka merubah tatanan ekonomi maupun sosial. Tak hanya itu, pariwisata diyakini mampu membuka banyak peluang kerja serta investasi diharapkan mampu mengubah struktur ekonomi dan peruntukan lahan, juga mampu memberi sumbangan terhadap neraca pembayaran di berbagai Negara. Adapun yang menjadi dampak dari sisi permintaan industri pariwisata yaitu ia akan menyebar ke sisi-sisi ekonomi serta berbagai macam industri lain yang terkait.

Menjadi harapan bersama jika industri pariwisata nantinya akan mampu memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa. Hal itu sangat dibutuhkan guna membiayai pembangunan nasional dan memelihara nilai tukar (kurs) mata uang rupiah terhadap

mata uang asing. Besarnya kontribusi ini menyebabkan pariwisata menjadi salah satu sektor “andalan” perekonomian nasional. Tak hanya itu, pariwisata sanggup untuk bersaing dengan sektor-sektor lain dalam memberi pendapatan devisa untuk Negara. Selain pendapatan devisa, sektor ini juga mampu memberikan kontribusi terhadap Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui retribusi dan pajak. Pada tahun 2020, penerimaan pajak nasional dari sektor pariwisata sebesar 7,6 triliun. Angka ini turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 16,3 triliun. Akan tetapi hal ini cukup dimaklumi mengingat Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19, tak hanya sektor pariwisata saja yang terkena imbasnya namun juga pada sektor-sektor lainnya. Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal pembangunan dibidang pariwisata mempunyai andil yang besar untuk turut mengembangkannya, hal ini mengingat ada banyak sekali keuntungan atau manfaat yang dapat diambil dari kegiatan tersebut, diantaranya: dapat menciptakan lapangan pekerjaan; meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat setempat, meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, memunculkan pengusaha-pengusaha baru melalui UKM, meningkatkan kreativitas dalam membuat kerajinan daerah yang nantinya akan dipasarkan ke para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

Pada akhirnya, perkembangan wisata akan mendatangkan beberapa pengaruh bagi perkembangan suatu wilayah. Diantaranya yaitu dampak ekonomi yang akan menghasilkan pendapatan. Pendapatan itu dihasilkan dari transaksi antara wisatawan dan tuan rumah dalam bentuk pembelian produk dan penggunaan jasa yang dilakukan oleh wisatawan. Artinya tidak hanya ke pihak-pihak yang terlibat langsung dalam industri pariwisata seperti, hotel, restoran, biro perjalanan wisata, dan pemandu wisata, akan tetapi juga bagi masyarakat setempat. Tak hanya pendapatan masyarakat sekitar yang meningkat, akan tetapi tawaran bermacam jenis profesi kreatif juga banyak bermunculan sehingga akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Akibatnya struktur ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih baik karena pendapatan masyarakat juga meningkat.

Sejalan pula dengan teorinya Dewa Putu dalam bukunya yang berjudul *Destinasi Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan* dimana adanya pengeluaran yang dilakukan oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengeluaran wisatawan erat kaitannya dengan kebutuhan berupa makan dan minum, transportasi, akomodasi, cendramata, hiburan, dan lain sebagainya. Wisatawan dalam rangka memenuhi kebutuhannya terhadap produk wisata, maka ia harus datang sendiri membeli produk wisata ke tempat produk tersebut dihasilkan. Berhubung produk wisata tersebut berada di tempat yang terpencar di kota-kota maupun di daerah pedesaan (pantai, pertanian, pegunungan, perkebunan dan lain-lain) sehingga disitulah pengeluaran wisatawan terjadi. Pada hakikatnya pariwisata menjadi sektor kegiatan yang paling manjur digunakan sebagai alat untuk pemerataan (Putu Dewa, 2013).

Didukung pula oleh teorinya Yoeti dalam (Hamida & Zaki, 2020) terkait manfaat yang dirasakan oleh pihak pelaku industri dan masyarakat sekitar terkait adanya wisata syariah di suatu daerah:

Menciptakan kesempatan untuk berusaha menjadi lebih baik. Ketika suatu daerah dikunjungi banyak wisatawan, daerah tersebut akan berbenah dan berusaha untuk menyediakan berbagai kebutuhan dan keinginan wisatawan dengan cara menyediakan fasilitas dan akomodasi yang sesuai dengan kaidah syariah.

Meningkatkan kesempatan kerja. Tak kala suatu industri pariwisata di suatu daerah semakin maju, maka dengan sendirinya hotel serta fasilitas pelengkap lainnya akan semakin banyak, tenaga kerja yang dibutuhkan pun harus dalam jumlah yang banyak. Sebagaimana diketahui *full employment* adalah salah satu tujuan utama dari kebijakan ekonomi makro. Meningkatkan kesempatan kerja akan mengarahkan daerah yang bersangkutan lebih dekat kepada pencapaian *full employment*.

Meningkatkan penerimaan pajak Pemerintah dan retribusi daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku bahwa setiap pembelian wisatawan maka akan

dikenai pajak. Perpajakan merupakan sebuah sayap pemerintah dalam kebijakan fiskal.

Meningkatkan pendapatan nasional melalui peningkatan produk dan jasa disalah satu sektornya. Seperti adanya peningkatan produk dan jasa oleh UKM di Kabupaten Muaro Jambi.

Mendorong peningkatan investasi dari sektor industri dan sektor ekonomi lainnya. Dengan implementasi sistem syariah, investasi utama harus diprioritaskan dari Negara-negara muslim. Dengan meningkatnya hal ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Masyarakat di sekitar Candi Muara Jambi adalah masyarakat yang beraneka ragam latar belakang pekerjaannya, ada yang sebagai buruh tani, guru, pegawai, pedagang, dan lain sebagainya. Menurut Pak Hery (tukang bentor atau becak di Candi) terkait adanya peluang Candi Muara Jambi dijadikan sebagai destinasi wisata syariah, beliau sangat antusias dan berharap adanya keberkahan dibalik wacana tersebut. Diakui beliau, mulai dari sisi fasilitas sebelum dan sesudah renovasi sangat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. Semakin baik fasilitasnya, maka akan semakin menambah ketertarikan pengunjung untuk datang, terlebih untuk para kaula muda. Beliau juga menyampaikan bahwasanya profesi sebagai tukang becak merupakan profesi sampingan. Karena profesi utama beliau adalah sebagai buruh penyadap karet. Beliau menyadap karet milik toke dekat rumahnya, dimulai setelah sholat subuh hingga pukul 10 pagi. Setelah itu beliau melanjutkan rutinitas sebagai tukang becak di Candi. Profesi sampingan ini diakui beliau sangat membantu perekonomian keluarganya, terlebih ketika ada event/festival/rombongan tour wisata dari luar daerah. Karena kawasan Candi ini begitu luas, maka pengunjung banyak yang tertarik untuk menggunakan jasa becak yang ditawarkannya. Terlebih kalau Candi ini nantinya dijadikan sebagai tempat wisata syariah, beliau yakin jumlah kunjungan dari luar akan semakin membludak. Hal itu membuat beliau tak perlu lagi repot-repot menyadap karet, karena cukup menjadi tukang becak di Candi saja sudah mampu memenuhi

kebutuhan keluarganya (Wawancara dengan Pak Hery, Tukang Bentor di Candi, Mei 2021).

Selain itu ada Ibu Susi (pedagang asongan di Candi). Beliau turut mendoakan juga semoga peluang ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Dulunya Ibu Susi ini adalah Ibu Rumah Tangga biasa, namun karena himpitan ekonomi dan juga melihat tetangga sekitarnya banyak yang berjualan di Candi maka ibu ini memutuskan untuk berjualan juga di Candi. Ibu ini mulai beroperasi dari pukul 9 pagi sampai sore. Adapun yang dijualnya mulai dari cemil-cemilan, minuman, es, tissue, rokok, bahkan sekarang sudah menjual mie goreng, sosis, dan lain sebagainya. Diakui beliau adanya Candi ini sangat membantu meningkatkan pendapatannya. Yang tadinya hanya mengandalkan pendapatan suami, sekarang sudah bisa membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tak jarang anak beliau juga turut membantu beliau untuk berdagang. Namun untuk kedepannya, Ibu Susi juga berharap kepada Pemerintah Daerah agar mau membantu mereka untuk merenovasi kios-kios yang telah rusak. Terlebih ketika cuaca hujan, mereka harus kewalahan untuk mengamankan barang-barang dagangan mereka (Wawancara dengan Ibu Susi, Pedagang Asongan di Candi, Mei 2021).

Potensi Wisata Syariah Candi Muara Jambi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Mewujudkan kesejahteraan umat manusia merupakan tujuan utama dari syariat ekonomi Islam. Kesejahteraan tersebut tidak hanya bisa diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar jasmani seperti sandang, pangan, dan papan saja, melainkan kebutuhan akan rohani seperti; ketenangan, kenyamanan, perlindungan, penghormatan, dan lain sebagainya. Adapun bentuk dari kesejahteraan masyarakat dapat dipandang dari kemampuan sekelompok masyarakat dalam mengembangkan sektor-sektor penunjang yang lain dalam hal pengembangan ekonomi, diantaranya ada sektor pariwisata. Pariwisata sangat memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara-negara terutama negara yang terdiri dari banyak pulau-pulau. Negara kepulauan memiliki lebih banyak obyek wisata sehingga pendapatan dari pajak dan retribusi

yang diperoleh melalui obyek wisata tersebut diharapkan mampu mendongkrak ekonomi daerah agar lekas tumbuh (Melania et al., 2019).

Sultan Adil Hendra (SAH) selaku Ketua Komisi X DPR RI Dapil Jambi dalam diskusi Pengembangan Pariwisata Syariah pada program Rencana Kerja Kemenpar 2019 di Jakarta (13/12) pernah menyampaikan bahwa beliau mensupport penuh jika Provinsi Jambi nantinya akan menjadi tujuan wisata syariah dunia. Beliau meyakini bahwa wisata syariah ini dapat menggerakkan rantai ekonomi lainnya, seperti transportasi, kuliner, hingga kerajinan tangan. Sektor wisata akan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah hingga 8%. Saat ini baru Nusa Tenggara Barat (NTB) yang unggul dalam wisata syariah, padahal Jambi juga memiliki potensi yang besar. Dalam hal ini peranan lembaga keuangan syariah terhadap pembiayaan wisata syariah masih rendah, sebab Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya belum memahami potensi besar di sektor tersebut, khususnya masalah investasi membangun fasilitas wisata seperti hotel dan lain sebagainya. Koordinasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan pendekatan terintegrasi dalam upaya pengembangan wisata syariah khususnya di Provinsi Jambi. Beliau optimis bahwa wisata syariah di Provinsi Jambi memiliki potensinya besar, ada Candi Muara Jambi dan lain sebagainya.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pak Agus selaku Pihak Tata Kelola Candi, beliau melihat adanya potensi Candi Muara Jambi yang nantinya dapat dikembangkan menjadi sektor pariwisata syariah. Dilihat dari mayoritas pengunjungnya yang didominasi oleh umat muslim, fasilitas ibadah (musholla) yang telah ada, adat istiadat setempat yang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, serta masyarakatnya yang ramah terhadap para pengunjung. Namun kita tak dapat pula menutup mata bahwasanya Candi ini juga memiliki kelemahan. Mulai dari sarana dan prasarana yang belum memenuhi standarisasi wisata syariah (musholla yang masih terbuka, belum ada tanda peringatan memasuki waktu ibadah, tempat wudhu juga masih terbuka), akses perbankan syariah yang jauh, biro perjalanan yang belum memenuhi

standarisasi syariah, hotel syariah juga belum ada, aksesibilitas yang cukup jauh, dan lain sebagainya. Untuk dapat merealisasikannya sebagai destinasi wisata syariah, tentunya beliau menyarankan agar semua pihak dapat memberikan kontribusinya dalam hal pengembangan. Dukungan secara moril maupun materil, sinergitas antar *stakeholder* terkait diharapkan mampu merealisasikan kebijakan yang telah dirumuskan. Jangan ada lagi sekat pembatas untuk memulai, jangan ada lagi yang merasa ditinggalkan ataupun merasa tersisihkan. Karena Candi ini merupakan aset bersama milik Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Muaro Jambi. Kalau Candi ini dikenal luas, maka akan membawa harum nama Jambi baik di kanca nasional maupun mancanegara (Wawancara dengan Pak Agus, Pihak Tata Kelola Candi, Juni 2021).

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pak Riko Mapaddeceng, beliau selaku tokoh akademisi di Universitas Batanghari Jambi. Beliau melihat bahwasanya Candi Muara Jambi memiliki peluang untuk dijadikan sebagai destinasi wisata syariah, dilihat dari adanya potensi yang cukup signifikan diantaranya adanya penguatan *hablumminannas* (hubungan sesama manusia), terbukti masyarakat Islam yang berada di sekitar kawasan Candi masih menjaga keberadaan maupun kelestarian dari Candi ini. Jika kita berbicara destinasi wisata syariah tentunya para wisatawan yang berkunjung tidak hanya disuguhkan keindahan alamnya saja akan tetapi lebih dari itu para wisatawan tetap bisa melakukan kewajibannya sebagai umat muslim sembari mentafakuri keindahan dan keagungan ciptaan Allah SWT. Dalam hal pengembangan untuk sampai kesana pun harus ada unsur-unsur yang mestinya kita penuhi. Mulai dari fasilitasnya, Sumber Daya Manusianya, aksesibilitasnya, pendirian bank-bank syariah di sekitar Candi (saat ini baru ada 1 bank syariah yang beroperasi di Kabupaten Muaro Jambi, yaitu KCP Bank Mandiri Syariah), dan yang terpenting realisasi kebijakan dari para instansi maupun *stakeholder* terkait. Adanya rumusan kebijakan tapi kalau tak ada tindak lanjutnya ya percuma saja. Adapun manfaat ekonomis dari Candi ini sangat membantu Pemerintah Daerah dalam

meningkatkan ekonomi daerah, terlebih bagi masyarakat setempat Candi yang berprofesi sebagai para pelaku usaha. Kelak jika nantinya Candi ini menjadi destinasi wisata syariah, maka banyak hal yang akan diuntungkan terlebih memperkenalkan Jambi secara lebih luas, disamping itu sektor ini juga diharapkan mampu menggerakkan sektor-sektor yang lainnya (Wawancara dengan Pak Riko, Tokoh Akademisi, Juni 2021).

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pak Abdul Hafis atau akrab dipanggil Pak Ahok, beliau adalah Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi Jambi. Pada dasarnya Candi Muara Jambi telah ditetapkan sebagai kawasan wisata sejarah terpadu tahun 2011, tahun 2017 desa Muara Jambi telah ditetapkan sebagai desa wisata, dan tahun 2013 kawasan Candi Muara Jambi juga telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional. Untuk peluang pengembangan Candi menjadi destinasi wisata syariah, beliau menyatakan bahwa Candi Muara Jambi memiliki potensi yang besar, namun untuk pengembangannya ada banyak pula hal yang harus diperhatikan. Utamanya adalah penguatan budaya. Budaya ini sangat penting sekali karena dampaknya akan mengubah perilaku, tatanan hidup, maupun pola pikir manusia, khususnya untuk para wisatawan yang berkunjung. Misalnya budaya di Candi yang tidak memperkenankan pengunjungnya untuk memakai celana pendek, pakaian terbuka (bikini), tidak melakukan maksiat di tempat wisata, dan masih banyak yang lain. Selain itu kearifan lokal juga harus dikuatkan. Misalnya jika laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedang jalan berdua maka akan sumbang di mata, kemudian tradisi seloko adat Jambi yang sampai hari ini masih dilestarikan, tradisi tukar lengkat (rantang) ke sanak keluarga maupun tetangga di hari-hari perayaan tertentu, dan lain sebagainya.

Beliau melanjutkan jika kita berbicara wisata syariah dan kita membandingkan wisata Candi Muara Jambi dengan wisata syariah yang ada di Lombok, Aceh, Pekanbaru, Sumatera Barat, dan lain sebagainya memang Jambi masih jauh tertinggal. Sebab daerah yang wisata syariahnya maju, didukung pula dengan latar belakang sejarah Islamnya. Misalnya

Pulau Lombok kenapa maju wisata syariahnya karena pulau Lombok mendapat julukan sebagai pulau Seribu Masjid, Pekanbaru maju sebagai wisata syariah karena Pusat Melayu Islam berada disana, Sumatera Barat maju sebagai wisata syariah karena Sumatera Barat banyak melahirkan tokoh pendiri dan pergerakan Islam, Aceh maju karena memiliki julukan sebagai kota Serambi Mekkah. Tak hanya itu keempat daerah ini juga didukung atraksi, aksesibilitas, maupun amenities yang matang. Sementara untuk Jambi (khususnya Candi Muara Jambi), dari sisi atraksinya ada atraksi kesenian (tari topeng, hadroh, pantun, dan lain sebagainya). Disamping itu juga ada warisan budaya, sejarah, dan lain-lain. (semestinya atraksinya atau kegiatan wisatanya lebih diperbanyak lagi).

Kemudian dari aksesibilitas karena jarak tempuh yang jauh, Pak Ahok menyarankan daripada para wisatawan membayar ongkos grab/taxi dari Bandara ke Candi dengan harga yang mahal sampai 200 ribuan, atau ongkos ojek sampai 100 ribuan, lebih baik Pemerintah Daerah menyediakan bus khusus untuk pengunjung bandara agar mereka bisa mendapatkan akses transportasi yang mudah dan murah. Atau penerbangan langsung dari Jambi ke Malaysia misalnya tanpa harus transit (seperti Sumatera Barat yang memiliki penerbangan langsung ke Singapura). Lalu dari sisi amenities Candi yang masih belum maksimal. Hal itu terlihat dari belum maksimalnya sarana dan prasarana Candi, mulai dari toiletnya, mushollanya, gazebonya, akses perbankan syariahnya, hotel syariahnya, dan lain sebagainya.

Belum lagi Pemerintah Daerah setempat yang sampai saat ini belum menandatangani penetapan zonasi untuk Candi, apakah masuk kedalam zona pengembangan (hijau), zona penyangga (kuning), atau zona inti (merah). Karena ketiga zonasi ini memiliki aturan tersendiri. Misal untuk zona pengembangan dan zona penyangga, karena Candi termasuk sebagai destinasi wisata konservasi maka kita masih diperkenankan untuk membangun, menambah atau mengembangkan pariwisatanya. Namun jika sudah memasuki zona inti maka Candi ini tidak bisa dimasukkan kedalam kawasan wisata syariah, karena tidak ada bangunan

apapun yang boleh dibangun disana. Jikapun bisa, beliau memprediksikan Candi Muara Jambi baru bisa maju menjadi wisata syariah butuh waktu sekitar 10-15 tahun kedepan, mengingat ada banyak sekali persiapan yang harus diperhatikan dan dimatangkan. Ditinjau dari sisi pertumbuhan ekonominya, tentu Candi ini memiliki pengaruh yang besar untuk menggerakkan sektor ekonomi. Bagaimana tidak hampir 45% masyarakat sekitar kawasan Candi telah menggantungkan hidupnya untuk mencari nafkah di tempat ini. Jika Candi ini nantinya berkembang menjadi wisata syariah tentunya akan lebih meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat sekitar Candi. Untuk mewujudkan semua itu bukan lagi harus kerja sama, karena saat ini kebanyakan orang memaknainya hanya pada sebatas kertas, melainkan kita harus sama-sama bekerja untuk memajukan pariwisata provinsi Jambi, khususnya Candi Muara Jambi agar lebih dikenal secara luas (Wawancara dengan Pak Ahok, Ketua HPI Provinsi Jambi, Juni 2021).

Adapun yang menjadi potensi Candi Muara Jambi dijadikan sebagai objek wisata syariah adalah sebagai berikut:

Mayoritas masyarakat Jambi beragama Islam, sesuai dengan filosofi adat bersandi syara', syara; bersendi kitabullah. Maknanya bahwa setiap perbuatan mestinya selalu ingat pada adat dan agama yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Fasilitas ibadah yang mendukung bagi wisatawan muslim, seperti adanya mushola dan tempat wudhu. Sehingga wisatawan tetap dapat melakukan ibadah sholat meskipun sedang dalam perjalanan wisata.

Setiap festival maupun event yang diselenggarakan selalu menyelipkan acara-acara yang berbau Islami, seperti qasidahan, kompiangan, maupun penampilan kesenian lain yang bermuara pada peningkatan spirit rohani umat muslim.

Meskipun belum ada hotel syariah disekitar kawasan Candi, akan tetapi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara diarahkan untuk menginap di homestay. Dimana homestay ini berada di wilayah perkampungan warga yang notabene-nya beragama muslim sehingga tidak

memungkinkan para wisatawan untuk berbuat asusila, mabuk-mabukan, berjudi, dan kegiatan lain yang bertentangan dengan norma-norma Islam.

Kendala Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Syariah Candi Muara Jambi

Saat ini bukan menjadi hal yang aneh didengar jika pariwisata menjadi sektor penting dalam upaya meningkatkan pendapatan suatu Negara ataupun daerah. Terutama bagi daerah-daerah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang memumpuni di bidang pariwisata. Karena dengan usaha Pemerintah dan masyarakatnya sendiri maka akan menciptakan keoptimalisasian pariwisata dalam aspek sarana dan prasarana. Jika sarana dan prasarana dapat berjalan dengan baik, wisatawan meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya juga akan meningkat. Adapun yang menjadi kendala Pemerintah dalam pengembangan Candi Muara Jambi menjadi wisata syariah adalah sebagai berikut:

Anggaran Dana yang Terbatas. Faktor utama yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata syariah ini adalah keterbatasan dana yang merupakan pendukung dan penunjang dari suatu kegiatan. Sebaik apapun suatu rencana atau strategi jika dana yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi dan kegiatan tersebut minim, maka akan mempengaruhi dan menghambat pengembangan. Untuk menjalankan strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi mendapat dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Provinsi. Sejak tahun 2006 pengembangan wisata telah dilakukan, hanya saja dana dari Pemerintah Provinsi tidak setiap tahun di dapatkan alhasil dana yang di andalkan yaitu hanya dari APBD Kabupaten.

Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkompeten di Bidangnya. Dalam hal pengembangan maupun pengelolaan objek wisata tentunya sangat membutuhkan SDM yang berkualitas sesuai bidangnya. Namun, dari hasil observasi terlihat hanya ada beberapa yang pendidikannya sesuai dengan bidangnya, yaitu bidang pariwisata syariah sehingga pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan belum maksimal dilakukan. Kurangnya

dukungan SDM yang memadai seperti dalam pelaksanaan promosi serta pengelolaan objek wisata Candi Muara Jambi. Untuk itu, sangat diperlukan suatu pelatihan dan pembinaan guna meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata.

Kebijakan yang Belum Terarah. Regulasi pariwisata merupakan regulasi, aturan, pedoman, serta arah dalam pelaksanaan pengembangan suatu pariwisata. Kebijakan atau regulasi di bidang pariwisata ini sangat penting guna mendorong pengembangan pariwisata melalui dukungan organisasi pariwisata nasional, agen biro perjalanan, akomodasi, dan sektor-sektor lainnya di pariwisata. Dalam pengembangan objek wisata Candi Muara Jambi, dibutuhkan suatu kebijakan khusus yang mengatur tentang pengembangan objek wisata tersebut. Tujuannya agar implementasi pengembangannya lebih jelas arah dan tujuannya. Namun sayang Dinas Pariwisata Provinsi Jambi hari ini belum mempunyai kebijakan maupun formula khusus guna mengatur pengembangan wisata, Candi Muara Jambi menuju objek wisata syariah. Pelaksanaan pengembangan hanya mengacu pada strategi, dan program dengan tanggung jawab serta wewenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Artinya kebijakan ini masih stagnan dan belum ada terobosan baru untuk mewujudkan Candi Muara Jambi menjadi salah satu destinasi wisata syariah di Provinsi Jambi, berbeda dengan Provinsi lain yang dengan gencar mengoptimalkan sektor pariwisatanya agar tak tertinggal.

Kurangnya Koordinasi Antara Dinas Pariwisata Provinsi dan Dinas Pariwisata Kabupaten. Koordinasi dalam hal apapun sangat penting dilakukan guna mencapai tujuan bersama. Namun sayangnya koordinasi yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi dan Dinas Pariwisata Kabupaten masih belum maksimal. Artinya, semangat dan antusias mereka hanya diawal. Setelah itu kembali dengan tupoksinya masing-masing. Sehingga Dinas Pariwisata Kabupaten merasa berjalan sendiri dan merasa seolah-olah ditinggalkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi. Alhasil, strategi hanya sebatas strategi tanpa ada eksekusi yang pasti.

Fasilitas Candi Muara Jambi yang Belum Memenuhi Standarisasi Wisata Syariah. Fasilitas Candi secara umum sangat minim, toilet tidak terawat, juga pusat informasi pengunjung yang belum bekerja secara optimal. Di dalam kawasan percandian Muara Jambi kurang lebih terdapat 56 kios non permanen yang menjual makanan dan minuman untuk para wisatawan yang berkunjung ke kawasan percandian Muara Jambi tetapi sebagian besar tidak dipergunakan, karena hanya dipergunakan untuk jualan disaat *high season*. Sudah didirikan beberapa panggung dan pendopo untuk menunjang pariwisata, tetapi semuanya tidak terurus. Terdapat juga kurang lebih 62 fasilitas penyewaan sepeda wisata yang bisa digunakan oleh wisatawan untuk berkeliling kawasan percandian Muara Jambi.

Untuk menjadi wisata syariah, meskipun di Candi sudah terdapat mushola dan tempat wudhu, namun kondisinya belum cukup baik, yakni tempat wudhu yang masih terbuka, dan belum adanya aturan maupun kebijakan pengelola Candi untuk pemberitahuan masuknya waktu ibadah. Selain itu, di sekitar kawasan Candi belum terdapat hotel syariah, akses perbankan syariah masih minim, wisatawan harus pergi ke Kota Jambi dulu untuk mendapatkannya, serta biro perjalanan yang belum berlabelkan syariah (China masih mendominasi). Tak hanya itu tempat penginapan wisatawan atau homestay masih minim yaitu hanya berkisar 22 *homestay* dengan fasilitas seadanya (belum sesuai standarisasi hotel syariah) sehingga membuat wisatawan merasa kurang puas akan pelayanan tempat yang diberikan.

Candi Muara Jambi Juga Menjadi Tempat Ibadah Agama Buddha. Meskipun mayoritas penduduk Provinsi Jambi beragama Islam, namun tak dapat dielakkan jika Candi ini juga digunakan untuk tempat ibadah agama Buddha di Indonesia, seperti kegiatan ashada, meditasi, napak tilas astisha, bahkan beberapa situs dijadikan pusat perayaan hari raya Waisak yang masuk dalam agenda Nasional disamping Candi Borobudur. Sehingga ketika ada perayaan besar agama Buddha menyebabkan wisatawan muslim menjadi kurang nyaman dalam berwisata.

Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Candi Muara Jambi Sebagai Wisata Syariah

Pada dasarnya, Pemerintah Daerah (Pemda) telah berupaya untuk mengembangkan Candi Muara Jambi menjadi tempat wisata syariah. Kerja sama yang dilakukan dengan *stakeholder* terkait juga telah dimaksimalkan. Mulai dari peningkatan kualitas sarana dan prasarana secara perlahan, peningkatan, kualitas pelayanan, promosi, serta kerjasama dengan beberapa biro perjalanan. Namun karena lokasi Candi Muara Jambi ini jarang didengar oleh wisatawan luar, alhasil banyak wisatawan yang kurang menegetahui lokasi Candi ini. Padahal telah banyak strategi yang digunakan dalam mempromosikan tempat wisata ini. Usaha yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi dalam menarik investor agar mereka mau menanamkan modalnya untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Muaro Jambi juga belum membuahkan hasil. Tak hanya itu, Pemerintah pun telah mensosialisasikan potensi wisata yang dimiliki diantaranya yaitu kawasan Candi Muara Jambi. Akan tetapi, sampai saat ini tak banyak investor luar yang mau menanamkan modalnya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di kawasan objek wisata ini.

Penyusunan strategi maupun kebijakan semestinya harus mampu untuk memberikan arahan dan motivasi guna tercapainya tujuan yang diharapkan secara bersama. Baik kinerja, manajerial, maupun perilaku juga harus tersistem dengan baik agar setiap aparatur dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan selama ini. Pun koordinasi yang baik antar *stakeholder* diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada dalam upaya pengembangan destinasi wisata syariah. Adapun strategi yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi diantaranya; (1) melakukan inovasi dan menerapkan strategi-strategi terbaru guna tercapainya sasaran yang sesuai. dengan visi dan misinya, dalam meningkatkan, kunjungan wisata; (2) Prestasi pemuda dan olahraga di lingkungan masyarakat sekitar juga harus dikembangkan agar daerah ini dapat dilirik oleh pihak luar; (3) mempertahankan keunikan budaya yang ada seperti keunikan *souvenir*, makanan khas

dari kawasan Candi Muara Jambi; cerita rakyat yang pernah terjadi serta keterkaitan tempat wisata dengan budaya adat istiadat Islami. Strategi tersebut diyakini dapat mengundang wisatawan untuk berkunjung ke Candi Muara Jambi.

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan pembahasan, maka diakhir kajian dapat ditarik kesimpulan bahwa Candi Muara Jambi berpotensi menjadi wisata syariah dilihat dari perkembangannya yang dapat memberikan pengaruh signifikan di bidang ekonomi, sekitar 45% masyarakat sekitar kawasan Candi yang menggantungkan hidupnya di tempat wisata ini. Selain itu mayoritas masyarakat Jambi yang beragama Islam, fasilitas ibadah yang mendukung bagi wisatawan muslim, adanya acara-acara yang berbau Islami di setiap festival maupun event yang diselenggarakan, adanya *homestay* yang dekat dengan perkampungan warga yang mayoritas beragama Islam, keunikan budaya serta kearifan lokal dari Candi ini juga turut mendukung pengembangan wisata syariah ini. Jika nantinya peluang ini dapat diimplementasikan, maka keuntungan ekonomis yang dapat dirasakan antara lain dapat menciptakan lapangan pekerjaan; meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat setempat, meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, memunculkan pengusaha-pengusaha baru melalui UKM, meningkatkan kreativitas dalam membuat kerajinan daerah yang nantinya akan dipasarkan kepada para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.

Namun jika dilihat secara keseluruhan, tempat wisata ini belum berpotensi sebagai tempat wisata syariah sebab dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa kebijakan yang belum mengarah pada aturan syariah, sehingga perbaikan dan peningkatan masih perlu ditinjau kembali agar nantinya tempat ini bisa dijadikan sebagai wisata syariah, diprediksikan sekitar 10-15 tahun lagi baru Candi ini dapat terealisasi menjadi wisata syariah. Pemerintah beserta *stakeholder* terkait diharapkan lebih menguatkan sinergitas guna membangun pariwisata Jambi menjadi

lebih baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aponno, C. (2020). Kontribusi Sektor Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(05).
- Azhar, A., & Salman, F. D. (2020). *Analysis of shariah tourism markets in bandung city. 01*.
- Ezizwita, et all (2022). Identifikasi Potensi Wisata Syariah dan Strategi Pengembangannya Ditengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*. 24(1).
- Hamida, G., & Zaki, I. (2020). Potensi Penerapan Prinsip Syariah pada Sektor Kepariwisata Kota Batu. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(1).
- Haryati, T., & Wuka, D. G. (2021). Potensi Wisata Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Kampung Apenas Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya. *Jurnal SEGE*, 1(1).
- Jaelani, A. (2017). Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects. *International Review of Management and Marketing*, 7(3).
- Mahardika, R. (2020). Strategi Pemasaran Wisata Halal. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1).
- Melania, Lara Jingga, et all (2019). *Analisis Potensi Syariah Tourism Dengan Mengoptimalkan Potensi Trans Garden Merangin*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Nasution, M. S., Prayitno, B., & Rois, I. (2020). Pengembangan Wisata Halal Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kota Mataram. *Istinbath*, 19(2).
- Pebriana, F., et all. (2021). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2019). *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1(1).
- Putu, Dewa. (2013). *Destinasi Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan*. Salemba Humanika.
- Rachmiatie, et all. (2020). Strategi Komunikasi Pariwisata Halal Studi Kasus Implementasi Halal Hotel di Indonesia dan Thailand. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1).
- Rahmi, A. N. (2020). Perkembangan pariwisata halal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1).
- Ramadhany, F., & Ridlwan, A. A. (2018). Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Muslim Heritage*, 3(1).
- Rozi, et all (2021). *Pengembangan Wisata Percandian Muaro Jambi Untuk Meningkatkan Kepuasan Wisata Lokal Dalam Berkunjung (Studi Kasus di Dinas Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan prospek wisata halal dalam meningkatkan ekonomi daerah (studi kasus: Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Sosial Politik*, 4(2).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wawancara dengan Ibu Susi. Pedagang Asongan di Candi. Tanggal 23 Mei 2021 di Candi Muara Jambi.
- Wawancara dengan Pak Ahok. Ketua Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) Provinsi Jambi. Tanggal 27 Juni 2021 di Candi Muara Jambi.
- Wawancara dengan Pak Hery. Tukang Bentor (Becak). Tanggal 23 Mei 2021 di Candi Muara Jambi.
- Wawancara dengan Pak Riko. Tokoh Akademisi. Tanggal 14 Juni 2021 di Kampus Universitas Batanghari Jambi.
- Wawancara dengan Pak Agus, Pihak Pengelola Candi. Tanggal 1 Juni 2021 via telepon seluler.

Internet:

<https://www.iaei-pusat.org/news/umum/pulau-lombok-raih-dua-penghargaan-internasional-world-halal-travel-awards-2015?language=id> diakses pada hari Kamis, 22 Oktober 2015 pukul 10.08 WIB.

<https://jambiberita.com/read/2018/12//14/5946425/sah>

dukung-provinsi-jambi-untuk-kembangkan-wisata-syariah/ diakses pada hari Jum'at, 14/12/2018 pukul 10:36:52 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/jambi.antaranews.com./amp/berita/303905/kemenparekraf-kembangkan-sembilan-destinasi-wisata-syariah> diakses pada hari Senin, 2 Juni 2014 pukul 18:02 WIB.